



**PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI KONFLIK DI UKRAINA
MELALUI *EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY* (ENP)
TAHUN 2014-2019**

Fiarry Isty Mawaty, Indah Puspasari, Resa Rasyidah

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Dalam muatan kebijakan ENP (EU Neighborhood Policy), Uni Eropa memberikan kontribusinya untuk ikut andil dalam beberapa konflik di negara-negara perbatasan wilayah—baik wilayah enlargement maupun wilayah dibawah kebijakan Neighborhood Policy guna menjaga kestabilan di dalam wilayah kekuasaan regional. Dari beberapa negara yang terdaftar dalam naungan kebijakan ENP, jurnal ini membahas salah satu negara tetangga yang tengah berkonflik yakni negara Ukraina. Negara Ukraina merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan wilayah regional kawasan Uni Eropa yang kerap kali mengalami konflik. Konflik yang terjadi di Ukraina merupakan konflik yang dapat mengancam stabilitas keamanan wilayah Uni Eropa. Konflik tersebut menimbulkan korban ribuan jiwa, dan menyebabkan beberapa aspek penting internal negara Ukraina semakin memburuk. Keadaan ini mengharuskan Uni Eropa untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik. Jurnal ini membahas bagaimana peran UE dalam menerapkan manajemen konflik di Ukraina. Penulis menggunakan konsep peran organisasi internasional dalam manajemen konflik dengan mengidentifikasi beberapa laporan-laporan yang telah dilakukan UE dengan penganalisaan secara kualitatif dan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Peran Uni Eropa, ENP (EU Neighborhood Policy), Ukraina

PENDAHULUAN

Pecahnya konflik di Ukraina awalnya bermula pada tahun 2014 dan terus mengalami eskalasi konflik hingga saat ini. Keseluruhan konflik di Ukraina ini berawal dari adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Ukraina atas keputusan Presiden Ukraina sebelumnya, Victor Yanukovych, yang menolak untuk menyetujui kesepakatan *Association Agreement (AA's)* dengan Uni Eropa (UE) (*Council on Foreign Relations, 2021*). Padahal, AA's ini digadagadag merupakan satu-satunya harapan bagi rakyat Ukraina untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana kondisi di Ukraina pada saat itu cukup memprihatinkan setelah sebelumnya sempat terkena dampak dari Krisis Finansial Global 2008. Pun, kondisi ini masih harus diperburuk dengan korupsi yang merajalela di dalam pemerintahan Ukraina. Keputusan tersebut kemudian memicu protes besar-besaran dan aksi unjuk rasa yang diprakarsai oleh *Euromaidan*. Namun, bukannya direspon dengan baik, pemerintah Ukraina justru menggunakan jalur kekerasan untuk meredam demonstrasi yang dilakukan oleh *Euromaidan* tersebut (Mandel, 2016). Tindak kekerasan yang kemudian merengut sebanyak 77 korban jiwa inilah yang kemudian memicu pecahnya konflik di Ukraina (Fishwick, 2014).

Melihat posisinya yang cukup terancam, Presiden Yanukovych pun melarikan diri dari Ukraina segera setelah tindak kekerasan terhadap *Euromaidan* ini semakin ricuh. Pelarian diri Yanukovych tersebut menyebabkan perpindahan kekuasaan ke tangan *Euromaidan*. Berbagai kekacauan politik yang sedemikian rupa ini kemudian dimanfaatkan oleh Rusia untuk melakukan intervensi terhadap Ukraina. Terdapat dua peristiwa intervensi yang dilakukan oleh Rusia pada kondisi ini, yang pertama yakni aneksasi wilayah Semenanjung Krimea secara ilegal.

Wilayah Semenanjung Krimea ini sebelumnya telah diambil alih oleh pasukan Rusia sebelum para warga dari Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum lokal yang disengketakan (*Council on Foreign Relations, 2021*). Akan tetapi, referendum ini memang menuai perdebatan karena klan *Tatars Crimean*, yang merupakan salah satu suku asli dari Krimea, menolak aneksasi dan pemisahan dari Semenanjung Krimea dari Ukraina. Akibat dari penolakannya tersebut, klan *Tatars Crimean* justru mendapatkan pelanggaran kemanusiaan mulai dari intimidasi, penculikan, penganiayaan, hingga pembunuhan terhadap etnisnya (*European Commission, 2019*).

Adapun yang kedua yakni intervensi Rusia terhadap kelompok separatis di wilayah *Donbass Region* yang berada di wilayah Ukraina Timur. Kelompok separatis dari *Donbass Region* yang terdiri dari wilayah *Donetsk* dan *Luhansk* ini dihasut oleh Rusia agar melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Ukraina. Aksi ini berhasil memunculkan konfrontasi antara kelompok separatis *Donbass Region* dengan pemerintah pusat Ukraina (Bebler, 2015). Bahkan, Rusia pun tidak segan-segan menyuplai persenjataan hingga pasukan militernya secara diam-diam untuk mendukung keberhasilan kelompok separatis di Timur Ukraina tersebut (Mitrokhin, 2015). Padahal, dengan adanya suplai dari Rusia tersebut, kelompok separatis di *Donbass Region* ini berpotensi muncul sebagai ancaman keamanan kawasan hingga global. Terlebih dengan melihat tindakannya pada 17 Juli 2014, sebagaimana para pemberontak dari *Donbass Region* ini menembak jatuh maskapai asal Malaysia, *Malaysian Airlines MH17*, dan menewaskan seluruh penumpang maskapai tersebut. Diperkirakan sebanyak 298 orang tewas dalam kejadian terkait (*European*

Commission, 2019). Pun, setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya pemberontak yang menembakkan misil tersebut salah mengira bahwa target yang dibidiknya adalah jet angkatan udara pemerintah Ukraina, alih-alih maskapai yang mengangkut warga sipil (Rudin, 2016). Tidak berhenti sampai disitu, mengacu pada laporan yang dipublikasi oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), konflik di Timur Ukraina antara kelompok separatis *Donbass Region* dengan pemerintah Ukraina ini telah merenggut nyawa sebanyak 13.000 korban jiwa meninggal dunia dan sebesar 24.000 lainnya luka-luka (King, 2019). Melihat tingginya eskalasi konflik di Ukraina dan kurangnya peran pemerintah dalam penanganan konflik dalam negaranya tersebut, maka intervensi dari pihak luar tentu menjadi opsi yang perlu diperhitungkan.

Uni Eropa (UE) merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan utama berupa upaya promosi perdamaian dan kesejahteraan. Apabila ditarik lebih jauh lagi dengan melihat rekam jejaknya selama ini, UE telah berhasil menciptakan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran hidup bagi masyarakat di kawasan Eropa (*European Union*, 2021). Oleh karena itu, UE mulai melebarkan sayapnya dengan tidak hanya bergerak di kawasan regional saja, namun juga ke ranah internasional. UE secara aktif merespon berbagai isu internasional. Respon UE terhadap isu-isu internasional ini tercantum dalam *European Union's Foreign and Security Policy* yang mencakup pedoman kebijakan UE untuk meningkatkan stabilitas di lingkungan Eropa dan sekitarnya, khususnya dibidang pertahanan dan keamanan (*European Union*, 2021). Sedangkan untuk negara-negara tetangganya, UE memiliki kebijakan khusus yang diatur dalam *European Neighbourhood Policy* (ENP) sebagai pedoman UE untuk merespon isu-isu di negara tetangganya. Kebijakan

ini berfungsi untuk meningkatkan stabilitas negara yang bersangkutan sehingga keamanan regional UE dan sekitarnya tetap terjaga (*European Union External Action Service*, 2021).

Melihat letak wilayahnya yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan Ukraina, didukung dengan situasi di Ukraina yang sedemikian rupa, UE selaku organisasi internasional memiliki tanggungjawab untuk merespon konflik yang sedang berlangsung di negara tetangganya, yakni Ukraina. Letak geografis negara Ukraina yang dekat dengan UE berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan negara-negara anggota UE. Atas dasar itulah dapat terlihat bahwasannya UE memiliki urgensi untuk merespon konflik yang sedang berlangsung di Ukraina tersebut melalui ENP. Oleh karena itu, penulis ingin mengevaluasi apa saja peran yang telah dilakukan oleh UE selaku organisasi internasional dalam merespon konflik di Ukraina tersebut. Dari sini, dapat ditemukan rumusan masalah yang akan diangkat yakni **"Bagaimana Peran Uni Eropa (UE) dalam Merespon Konflik di Ukraina pada Tahun 2014-2019 melalui *European Neighbourhood Policy* (ENP)?"** Adapun justifikasi dari jangkauan waktu penelitian antara tahun 2014-2019 ini dipilih lantaran eskalasi konflik di Ukraina yang mulai mencuat pada tahun 2014 hingga tahun 2019 dimana kondisi di Ukraina sudah mulai mengalami peningkatan dan terbilang sebagai tahun paling stabil mengacu pada statistik berikut (Lihat Gambar 1.1).



Gambar 1.1 (Tingkat Stabilitas Ukraina Tahun 2004-2019)

Sumber: (*World Bank, 2020*)

Terdapat pemahaman bahwa sebagian besar aktor dunia internasional memiliki pemahaman untuk tetap mewujudkan kedamaian sebagai salah satu tujuan utamanya, upaya dalam usaha menjaga kestabilan tersebut juga dimiliki oleh sebagian besar organisasi internasional. Karakteristik organisasi internasional yang berusaha dalam memberikan sebuah kelebihan, keuntungan dan keamanan terhadap setiap anggota sering aspek tersebut berkaitan dengan tujuan kedamaian. Organisasi internasional yang berusaha untuk menghindari konflik dan memiliki tujuan kedamaian, sering kali organisasi internasional tersebut harus ikut terlibat untuk menempatkan diri mereka sebagai penengah atau pemberi penyelesaian masalah terhadap konflik yang tengah terjadi—dengan melibatkan peran-peran yang telah ada di dalam tatanan organisasi internasional itu sendiri (Thruelsen, 2009).

Pendekatan manajemen konflik dipahami mencakup berbagai tindakan, Tindakan tersebut semua dirancang untuk pemberlakuan pencegahan konflik dan akhirnya menuju sampai ke tahap resolusi konflik. Rangkaian pendekatan yang dilakukan dalam sebuah manajemen konflik memiliki varian yang sesuai dengan tingkat komitmen yang diperlukan dan tingkat operasional yang harus dilakukan (Cox & Jacobson, 1973). Dari ujung rangkaian tersebut, organisasi-organisasi regional menciptakan beberapa kebijakan dalam berbagai aspek, yang beberapa diantaranya merupakan aspek dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan di wilayah regional tersebut. (Euka & Nwagbo, 2016)

Bergerak di sepanjang rangkaian yang menunjukkan komitmen yang lebih besar dan pendekatan yang lebih operasional, organisasi internasional

maupun regional melakukan berbagai upaya diplomatik untuk memajukan agenda perdamaian dan keamanan. Upaya diplomatik seperti mediasi, organisasi internasional cenderung menganggap bahwa konflik pada akhirnya tidak dapat dikelola maupun terselesaikan kecuali dilakukan oleh pihak yang bersengketa itu sendiri. Upaya-upaya diplomatik dapat mencapai sebuah manajemen konflik dalam beberapa karakteristik pendekatan yang berbeda, terutama dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa ketika sebuah pencapaian resolusi yang dilakukan antar pihak yang bersengketa tidak kunjung menemukan titik terang (Euka & Nwagbo, 2016). Sebuah organisasi internasional dapat memperjelas posisi para pihak yang bersengketa, mendefinisikan kembali masalah secara seksama, memberikan saluran untuk bernegosiasi, menekan masing-masing pihak untuk membuat konsesi dan merumuskan proposal resolusi alternative (Hopman, 1996).

Dalam bukunya yang berjudul *“International Organizations: Their Role in Conflict Management”* Thruelsen menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk melihat peran organisasi internasional dalam sistem tatanan dunia internasional, dan Thruelsen memiliki pandangan bahwa ia setuju dengan sebuah anggapan organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam bidang perdamaian dan keamanan untuk penanganan sebuah konflik. Kemajuan dalam manajemen konflik menunjukkan bahwa semakin banyak konflik yang diselesaikan melalui negosiasi dan bukan di medan pertempuran, dan organisasi internasional memainkan peran yang semakin penting dalam menyelesaikan perselisihan ini. Pada saat yang sama, kompleksitas konflik kontemporer dan manajemen konflik menimbulkan tantangan besar bagi struktur, sumber daya, dan peran sebagian besar

organisasi internasional yang terlibat di dalamnya. Salah satu cara untuk menyusun penelitian dalam bidang manajemen konflik adalah membagi wilayah konflik menjadi beberapa fase yang berbeda, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Ketika fase-fase ini disatukan, mereka dapat dilihat sebagai membentuk siklus konflik yang lengkap, yang sebagian besar konflik terjadi dalam satu arah atau lainnya. Konflik tidak boleh dilihat sebagai fenomena tunggal dengan ciri-ciri yang identik (Thruelsen, 2009).

Langkah-langkah pencegahan konflik struktural terdiri dari strategi yang berkonsentrasi pada akar penyebab konflik tertentu. Dalam perannya untuk memberikan atau melakukan sebuah resolusi konflik, organisasi internasional memiliki beberapa fase dan memiliki aksi pendekatan untuk melakukan agenda resolusi manajemen konfliknya, yang di mana aksi indikator tersebut juga berdasarkan ketentuan kebijakan yang ditetapkan oleh setiap organisasi internasional masing-masing. Thruelsen menjelaskan terdapat 5 fase konflik yang dapat melibatkan adanya peran sebuah organisasi internasional turut terlibat, berikut adalah penjelasan 5 fase tersebut dengan beberapa indikator terkait di dalamnya.

Untuk menjawab rumusan masalah yang membahas peran Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional dalam penyelesaian konflik yang terjadi di negara Ukraina, penulis menggunakan konsep teori peran organisasi internasional dalam manajemen konflik. Penggunaan konsep tersebut penulis gunakan sebagai dasar penjelasan keterkaitan peran Uni Eropa dalam keterlibatannya untuk memberikan resolusi manajemen konflik dengan beberapa fase pendekatan sesuai dengan fase konflik yang tengah dihadapi oleh negara Ukraina.

Fase yang pertama adalah fase *potential conflict*, fase ini ditandai dengan adanya kondisi yang mendasari atau

faktor mobilisasi yang menyebabkan munculnya konflik. Dalam fase ini langkah-langkah pencegahan konflik struktural dapat dimulai untuk mencegah perkembangan konflik. Di sini, tujuannya untuk mengatasi akar penyebab konflik, seperti *poverty alleviation horizontal inequality, by promoting good governance*, pendidikan dan *civil society* (Thruelsen, 2009).

Untuk fase selanjutnya adalah fase *gestation of conflict*, fase ini ditandai dengan beberapa aktor yang dimobilisasi menuju konflik dan terjadinya represi dengan intensitas rendah. Konflik belum muncul, tetapi mobilisasi meningkat. Langkah-langkah operasional, yang dicirikan sebagai manajemen konflik dan pencegahan, harus fokus pada strategi tingkat rendah, seperti pencegahan senjata, pemeliharaan perdamaian preventif, mempromosikan kebebasan pers, advokasi hak asasi manusia, mempromosikan dialog dan kerjasama (Thruelsen, 2009).

Fase ketiga adalah fase *mobilization of conflict*, fase ini sering disebut sebagai 'fase pemicu' ditandai dengan tingkat ketegangan dan konfrontasi yang tinggi antara pihak-pihak yang telah terlibat pada fase-fase sebelumnya. Di dalam fase ini, Thruelsen menjelaskan bahwa dalam fase *mobilization of conflict* langkah-langkah yang ditempuh untuk pencegahan konflik yang dilakukan oleh sebuah organisasi internasional berjalan dengan memiliki tujuan untuk mencegah agar konflik tidak kembali meningkat. Tindakan tersebut termasuk kecaman preventif oleh organisasi regional dan global, mediasi internasional, mediasi melalui saluran informal, perjanjian keamanan, dan penempatan pengamat (Thruelsen, 2009).

Fase keempat adalah fase *armed conflict*, dalam fase ini kekerasan meningkat menjadi konflik bersenjata skala penuh, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, krisis kemanusiaan, pengungsi, dan faksi yang

bertikai. Komunitas internasional mengutuk perkelahian tersebut dan memintanya untuk dihentikan. Penegakan perdamaian akan digunakan ketika tidak ada cara lain yang tersedia dan ketika pihak ketiga yang kuat bersedia menggunakan kekuatan untuk berusaha meredam konflik, paling sering adalah sebuah negara, organisasi regional atau internasional yang bertindak untuk menyelesaikan konflik. Tindakan pencegahan konflik yang terutama operasional akan digunakan dalam fase ini untuk menghentikan atau menahan konflik, dengan pemberlakuan seperti mediasi, penunjukan utusan khusus oleh organisasi regional atau internasional, embargo senjata, zona demiliterisasi, intervensi dan penegakan perdamaian (Thruelsen, 2009).

Untuk fase yang terakhir menurut Thruelsen adalah fase *post-conflict* atau pasca-konflik, fase ini adalah fase yang sangat rapuh, dengan kemungkinan konflik yang terus muncul kembali. Pada tahap ini, komunitas internasional harus memasukkan langkah-langkah pencegahan struktural dan operasional untuk membuat pembangunan perdamaian berkelanjutan yang berhasil. Dalam fase ini, elemen-elemen seperti program demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi dilaksanakan. Serta dukungan untuk pembentukan institusi politik, pasukan penjaga perdamaian dan penegakan perdamaian, reformasi sektor keamanan, rekonstruksi ekonomi, rekonsiliasi sosial, dan pembangunan kapasitas kelembagaan (Thruelsen, 2009).

Dengan penjelasan kelima fase konflik dan pendekatannya tersebut--dan juga seperti bagaimana dari penjelasan latar belakang masalah--keterlibatan peran Uni Eropa dalam konflik di negara Ukraina ini maka dapat dilihat bahwa peran tersebut merupakan peran yang berada di fase keempat yakni fase *armed conflict* dari kelima fase yang

telah dijelaskan oleh Thruelsen. Karakteristik dari konflik Ukraina yang masih menimbulkan korban jiwa dan tingginya penggunaan senjata semasa jangkauan penelitian yang penulis gunakan --tahun 2014-2019-- menjadikan fase *armed conflict* tersebut merupakan fase yang sesuai untuk pembahasan dalam jurnal ini. Berikut adalah tabel penjelasan fase dan indikator yang akan digunakan dalam jurnal ini dengan menyesuaikan penjelasan teori Thruelsen;

Tabel 1.1 (Fase dan Pendekatan Konflik menurut Thruelsen)

Phase	Measures	
<i>Armed Conflict Armed Violence or War</i>	<i>Operational Conflict Management and Termination Conflict</i>	Mediasi, penunjukan utusan khusus oleh organisasi regional atau internasional, embargo senjata, zona demiliterisasi, intervensi dan penegakan perdamaian

Sumber Tabel : (Thruelsen, 2009).

Dari definisi penjelasan, dan pendekatan yang dilakukan dalam peran organisasi internasional mengenai resolusi konflik dan manajemen konflik, maka penulis juga menggunakan salah satu kajian terdahulu yang relevan dalam pembahasan peran Uni Eropa dalam resolusi konfliknya, untuk kajian jurnal yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Georgi Kamov (2006) yang berjudul "*EU Role in Conflict Resolution : The Case of Eastern Enlargement and*

Neighbourhood Policy Area" (Kamov, 2006). Dalam jurnal ini Kamov memiliki pandangan bahwa Uni Eropa memang mampu untuk melibatkan diri mereka dalam konflik yang melibatkan negara tetangga kawasan wilayah mereka, pendekatan yang digunakan pun harus dilakukan dengan kondisi yang disesuaikan dengan beberapa aspek karakteristik konflik dan negara yang terlibat untuk dipertimbangkan dengan memiliki pemahaman penuh setiap aktor yang terlibat. Pertimbangan keterlibatan Uni Eropa sebagai salah satu pihak yang ikut menyelesaikan masalah memang merupakan sebagian salah satu langkah untuk menjaga kestabilan kawasan dan memperkuat jaringan *Enlargement EU*.

Sejauh pencarian penulis dalam mencari beberapa kajian penelitian yang dapat digunakan dalam jurnal ini, ditemukan bahwa kajian-kajian tersebut berfokus pada bagaimana peran Uni Eropa dalam manajemen konflik hanya dilakukan dengan penyesuaian pendekatan peran Uni Eropa dari pandangan konsep peran organisasi internasional saja. Kajian mengenai sebuah peran organisasi internasional dalam manajemen konflik yang juga mengkaitkan bagaimana langkah-langkah pendekatan sebuah organisasi internasional untuk fokus dalam beberapa fase konflik yang memiliki karakteristik berbeda masih terbatas ruang lingkupnya, sehingga dalam hal ini menjadi kesempatan untuk penulis mengkaji tema tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulis akan melakukan metode penelitian secara kualitatif dan menggunakan metode pendukung yakni deskriptif analistik yang digunakan penulis untuk menggambarkan hasil temuan data dengan jelas bagaimana peran Uni Eropa dalam keikutsertaannya memberikan resolusi manajemen konflik yang terjadi di negara Ukraina. Untuk teknik pengumpulan data, sesuai dengan penggunaan metode kualitatif, penulis

akan menggunakan metode *library search secondary data* seperti, media massa, atau artikel-artikel internet yang sesuai dengan kredibilitas yang akan dibutuhkan yang dapat ditemukan seperti; penelitian terlebih dahulu, dokumen resmi, laporan website resmi Uni Eropa terkait.

HASIL PEMBAHASAN

Mengacu pada latar belakang pecahnya konflik di Ukraina yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat bahwasannya konflik antara Ukraina dengan Rusia yang meliputi konflik di wilayah Krimea dan kawasan Timur Ukraina ini mengalami eskalasi konflik yang cukup signifikan. Sengitnya konflik bersenjata antara kedua belah pihak tersebut pun kemudian mulai merambat ke isu-isu lainnya seperti halnya pelanggaran HAM yang mengarah pada krisis kemanusiaan maupun ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik yang mendukung meningkatnya krisis ekonomi dan politik di Ukraina. Akibatnya, krisis di Ukraina ini pun dinilai termasuk dalam krisis internasional (Bojcin, 2016). Sebagaimana telah dianggap dalam kategori krisis internasional, maka konflik di Ukraina ini memerlukan intervensi dari aktor internasional untuk ikut terlibat dalam proses penanganan krisis di Ukraina terkait. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Thruelsen sebelumnya terkait manajemen konflik, dimana kondisi eskalasi konflik yang dialami oleh Ukraina disini termasuk dalam fase keempat manajemen konflik, yakni fase *armed conflict*. Pada fase ini, Thruelsen menjelaskan bahwasannya aktor internasional disini berperan sebagai aktor yang melakukan tindakan-tindakan pencegahan konflik, baik melalui intervensi, mediasi, embargo senjata atau gencatan senjata maupun tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menegakkan perdamaian (Thruelsen, 2009). Oleh karena itu, UE sebagai salah satu aktor

internasional yang letak wilayahnya paling dekat dengan Ukraina memiliki keperluan untuk ikut berpartisipasi dan berperan dalam proses penanganan konflik di Ukraina ini melalui tindakan-tindakan tersebut.

Tindakan UE dalam merespon konflik di Ukraina ini utamanya diatur dalam *European Neighbourhood Policy (ENP)*, yang berupa kebijakan luar negeri UE yang dikhususkan untuk meningkatkan perkembangan stabilitas, keamanan dan kesejahteraan di lingkungan sekitar UE. Ini dikarenakan, kestabilan lingkungan sekitar UE akan berpengaruh terhadap keamanan negara-negara anggota UE sendiri. Dalam implementasinya, ENP ini memiliki tiga prioritas utama yakni pembangunan ekonomi untuk stabilisasi, keamanan, migrasi dan mobilitas (*European Union External Action Service, 2021*). Disini, penulis akan membatasi penelitian hanya pada ENP di bidang keamanan, dimana UE disini berfokus pada upaya dialog atau mediasi konflik, pembentukan program-program di sektor keamanan, hingga reformasi di sektor keamanan (*European Commission, 2017*).

Peran pertama yang akan dibahas disini adalah upaya mediasi yang dilakukan oleh UE dengan tujuan untuk meminimalisir eskalasi konflik hingga dapat mencapai perjanjian damai. Upaya mediasi pertama awalnya dicoba oleh UE melalui *Geneva Agreement*, yang dilaksanakan pada 17 April 2014. Mediasi yang diikuti oleh UE, Amerika Serikat, Ukraina dan Rusia ini termasuk dalam salah satu langkah de-eskalasi konflik. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak, yakni Ukraina dan Rusia, wajib menahan diri dari tindakan-tindakan intimidasi maupun yang melibatkan kekerasan. Kesepakatan ini muncul lantaran kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan kekerasan, dimana kelompok separatis *Donbass Region* tetap berupaya mati-

matian merebut gedung pemerintahan Ukraina yang terletak di wilayah Timur Ukraina. Begitupun sebaliknya, dimana pemerintah Ukraina menjuluki kelompok separatis *Donbass Region* ini sebagai kelompok terorisme. Bahkan, pemerintah Ukraina tidak segan-segan meluncurkan operasi 'anti-terorisme' yang dikhususkan sebagai tindakan pencegahan bagi aksi yang dilaksanakan oleh kelompok separatis Timur Ukraina tersebut. Operasi tersebut telah menyebabkan 3 orang yang termasuk dalam golongan kelompok separatis tersebut terbunuh (*Radio Free Europe / Radio Liberty, 2014*). Atas dasar itulah, *Geneva Agreement* ini juga menyepakati pelucutan senjata seluruh pasukan bersenjata yang ilegal. Tak hanya itu, seluruh gedung yang direbut secara ilegal juga harus dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Apabila poin-poin yang tercantum pada kesepakatan ini dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka jaminan amnesti akan diberikan kepada pihak-pihak terkait (*Interfax-Ukraine, 2014*). Akan tetapi, kesepakatan ini nyatanya tidak menemui titik terang lantaran pihak Rusia tidak melaksanakan poin-poin yang telah disepakati pada *Geneva Agreement* ini setelah UE dan Ukraina menuding Rusia bertanggungjawab atas pecahnya konflik di Ukraina tersebut. Statemen ini langsung mengubah pikiran Rusia dan menjadi akar penyebab kegagalan *Geneva Agreement* (Litra, Medynskyi, & Zarembo, 2017).

Pada 2015, UE kembali merencanakan upaya mediasi selanjutnya melalui *Minsk Protocol* yang terdiri dari *Minsk Protocol 1* dan *Minsk Protocol 2*. Penyelenggaraan *Minsk Protocol* antara Ukraina dan Rusia ini dilaksanakan sebanyak 2 kali lantaran poin-poin kesepakatan dalam *Minsk Protocol 1* yang dilaksanakan pada Februari 2015 tersebut terbilang abu-abu. Poin-poin kesepakatan yang telah disorot dalam kesepakatan ini tidak

dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik Rusia maupun Ukraina. Oleh karena itu, sebagai alternatif atas tidak terlaksananya *Minsk Protocol I* sebelumnya, dibentuklah *Minsk Protocol II*. *Minsk Protocol II* mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan mengadopsi poin-poin kesepakatan yang sempat dibahas dalam *Minsk Protocol I*, mulai dari pertukaran tahanan, gencatan senjata hingga penarikan kepemilikan senjata berat. Selama proses pertemuan ini berlangsung, nyatanya ditemukan sebuah solusi untuk meredam konflik di Ukraina yang kemudian disepakati bersama, yakni dikeluarkannya Undang-Undang Status Khusus bagi wilayah *Donbass Region*. Sebagaimana para separatis *Donbass Region* ini ingin melepaskan diri dari Ukraina, maka pemerintah Ukraina melalui disahkannya UU tersebut akan memberikan otonomi terhadap wilayah *Donbass Region* yang utamanya dikuasai oleh para separatis. Dengan adanya otonomi yang telah diberikan pemerintah Ukraina tersebut, *Donbass Region* diizinkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan menentukan sendiri pemerintahan dan peraturan daerahnya. Akan tetapi, kesepakatan ini tentu saja menuai kontroversi di kalangan masyarakat Ukraina sendiri. Ini dikarenakan, sebagian besar masyarakat Ukraina menilai bahwasannya UU ini secara tidak langsung memperlihatkan pemerintah Ukraina memberi konsesi bagi para separatis yang dianggap sebagai 'musuh'. Bahkan bisa dikatakan bahwa pemerintah Ukraina rela mengorbankan Ukraina demi mempertahankan reputasinya di lingkup internasional. Oleh karena itu, melihat adanya ketidaksetujuan dari warga negaranya, dan tidak ingin peristiwa seperti Revolusi Euromaidan sebelumnya terulang kembali, kesepakatan ini kemudian kembali menemui jalan buntu (Gressel, 2016).

Akan tetapi, kegagalan dari *Minsk Protocol* ini justru menyebabkan konflik bersenjata di Ukraina, khususnya di *Donbass Region*, terus berlanjut. Selang tiga tahun kemudian, UE mulai menyusun kembali langkah-langkah mediasi untuk menyelesaikan konflik Ukraina ini. Tepatnya pada akhir tahun 2019, UE menyelenggarakan *Normandy Summit* masih dengan menekankan pada upaya-upaya menuju kesepakatan damai seperti halnya gencatan senjata, pertukaran tahanan dan evolusi politik yang selama 6 tahun belakangan ini selalu menemui kebuntuan. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Rusia dan Ukraina setuju untuk melaksanakan gencatan senjata sepenuhnya, diikuti dengan pertukaran tahanan di akhir tahun 2019. Bahkan, baik dari pihak Rusia maupun Ukraina disini juga memberikan izin terhadap OSCE untuk memantau zona konflik selama waktu yang diperlukan. Akan tetapi, rupanya ketakutan pemerintah Ukraina sebelumnya benar-benar terjadi. Muncul gerakan yang menuntut protes atas keputusan yang diambil oleh pemerintah Ukraina. Gerakan ini menyatakan bahwasannya pemerintah Ukraina kalah terhadap tekanan politik dari Rusia dan tidak memperjuangkan integritas wilayah Ukraina. Akibatnya, lagi-lagi kesepakatan ini kembali menemui kegagalan (Gorchinskaya, 2019).

Selain berperan pada upaya-upaya mediasi konflik, UE disini juga membentuk dan mengembangkan program-program yang utamanya bergerak di sektor keamanan. Tujuan dibentuknya program-program ini utamanya untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina, sebagaimana adanya keterlibatan Rusia dalam konflik ini secara tidak langsung telah mencederai kedaulatan Ukraina selaku negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, program-program ini juga berfungsi untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan Ukraina dari

ancaman-ancaman konflik yang sedang berlangsung di negaranya. Adapun beberapa program keamanan yang diprakarsai oleh UE diantaranya *European Border and Coast Guard Agency* (Frontex), *The European Union Border Assistance Mission* (EUBAM) dan *European Union Advisory Mission* (EUAM) *Ukraine*.

European Border and Coast Guard Agency (Frontex) di lingkup internasional utamanya bertugas sebagai pihak yang menangani isu migrasi, pengungsi, hingga aktivitas kriminal lintas batas. Tak hanya itu, Frontex disini juga berperan sebagai pihak yang mengkoordinasikan persebaran staf-staf terlatih maupun perlengkapan militer mulai dari pesawat terbang, kapal selam, maupun peralatan-peralatan penunjang pengawasan bagi area atau negara di luar kawasan yang membutuhkan bantuan tambahan (*European Union, 2021*). Sebagaimana konflik di Ukraina ini sendiri termasuk dalam tindak kriminal lintas batas mengingat konflik ini melibatkan dua negara yang berbeda yakni Ukraina dan Rusia. Adapun sebagai bentuk atas implementasi tugasnya, Frontex telah mengutus para anggota-anggota terlatihnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan militer bagi pasukan keamanan di Ukraina dengan tujuan dapat menunjang kemampuan para pasukan keamanan di Ukraina tersebut (Litra, Medynskyi, & Zarembo, 2017).

Adapun program berikutnya yang diprakarsai oleh UE yakni *The European Union Border Assistance Mission* (EUBAM). EUBAM merupakan lembaga yang dibentuk oleh UE dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan regional sekaligus mempromosikan pembangunan ekonomi (Ivashchenko-Stadnik et al., 2018). Misi EUBAM dalam meningkatkan keamanan regional disini terkait dengan manajemen keamanan perbatasan dan membantu menangkal kejahatan transnasional atau lintas batas. Untuk mendukung upayanya

menjaga keamanan perbatasan, EUBAM memiliki program bernama *Integrated Border Management* (IBM) yang didesain untuk memelihara keamanan perbatasan dengan berperan sebagai koordinator yang mengatur koordinasi antar para penjaga perbatasan yang bertugas, termasuk juga para aktor internasional yang bekerjasama dengan UE (*European Union External Action, 2021*).

Sedangkan *European Union Advisory Mission* (EUAM) *Ukraine*, merupakan program khusus yang dibentuk oleh UE segera setelah revolusi Euromaidan pada tahun 2014. Disini EUAM berperan sebagai pihak yang bekerjasama dengan pemerintah lokal dalam merumuskan reformasi berkelanjutan di sektor keamanan. Implementasi dari reformasi sektor keamanan ini nanti akan terus dikoordinasikan satu sama lain untuk memantau hasil dari reformasi terkait terhadap kondisi di lapangan. Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi keamanan di Ukraina tersebut, terdapat tiga pilar yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan reformasi keamanan Ukraina. Dalam pilar pertamanya, EUAM akan menyediakan saran-saran strategis sebagai bentuk evaluasi yang berguna untuk mengembangkan strategi keamanan di Ukraina itu sendiri. Kemudian pada pilar kedua, EUAM akan memberikan dukungan praktis untuk menunjang langkah-langkah reformasi secara spesifik yang sesuai dengan standar UE beserta prinsip-prinsip internasional terkait tata pemerintahan dan hak asasi manusia yang baik. Dukungan ini dapat berupa saran praktis, pelatihan, proyek atau program-program lainnya. Sedangkan pada pilar ketiga, EUAM akan menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan jalannya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Ukraina dengan UE dalam proses implementasi reformasi keamanan di Ukraina (EUAM Ukraine, 2021).

Sebelum memasuki pembahasan terkait reformasi sektor keamanan oleh EUAM, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi politik dan keamanan di Ukraina. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi, rupanya lembaga keamanan di Ukraina masih mengacu pada model lembaga pemerintahan Uni Soviet dahulu. Terbukti dari Kementerian Dalam Negeri Ukraina, atau yang terkadang disebut Kementerian Kepolisian, memiliki potensi politik dan analisis yang rendah. Karyawan di sektor penegakan hukum yang rata-rata rasionya sejumlah 2-3 orang karyawan per-1000 penduduk, bisa mencapai 6-9 orang banyaknya di negara Ukraina. Lemahnya lembaga keamanan di Ukraina inilah yang kemudian menjadi pemicu utama ketidaksiapan dan ketidaksiapannya dalam mempertahankan kedaulatan dan warga negaranya dari serangan Rusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila lemahnya sektor keamanan di Ukraina ini dinilai cukup berpengaruh terhadap tahap awal munculnya konflik di Ukraina tersebut (Litra, Medynskyi, & Zarembo, 2017).

Melihat kondisi politik di Ukraina yang sedemikian rupa, maka reformasi sektor keamanan tentu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh UE. Disinilah peran EUAM dalam merancang reformasi sektor keamanan di Ukraina diperlukan. Adapun beberapa reformasi sektor keamanan EUAM untuk Ukraina diantaranya mencakup pemantapan kegiatan penegakan hukum dalam lingkup tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. Menindaklanjuti lemahnya lembaga keamanan seperti halnya Kementerian Dalam Negeri seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka EUAM disini mengupayakan pengembangan kementerian sebagai badan eksekutif utama yang bertugas untuk merumuskan dan mewujudkan kebijakan di bidang penegakan hukum, perlindungan perbatasan negara hingga perlindungan

sipil sesuai dengan isu-isu utama yang sedang terjadi di Ukraina. Dengan begitu maka, Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi aktor yang dapat diandalkan untuk merespon isu-isu keamanan di Ukraina hingga terciptanya stabilitas di Ukraina. Adapun badan yang dibawah oleh Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan reformasi keamanan ini ialah Kepolisian Nasional Ukraina. Sebagai dukungan untuk memaksimalkan peran Kementerian Dalam Negeri untuk menegakkan hukum, EUAM memilih untuk meningkatkan fungsi dari Kepolisian Nasional Ukraina sebagai badan eksekutif yang memegang peran utama dalam melawan kejahatan serta menjamin ketertiban umum di wilayah negara Ukraina. Para petugas yang tergabung dalam Kepolisian Nasional Ukraina ini kemudian dilatih hingga dapat dikatakan mumpuni. Setelah berjalan selama satu tahun lamanya, reformasi ini dinilai berhasil lantaran tingkat kepercayaan masyarakat setempat terhadap patroli polisi mencapai angka 46%, dimana sebelumnya kepolisian terdahulu hanya mampu meraih angka 16% saja (Litra, Medynskyi, & Zarembo, 2017).

SIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya UE selaku aktor organisasi internasional telah melaksanakan perannya dalam manajemen konflik di wilayah Ukraina sesuai dengan teori peran organisasi internasional dalam manajemen konflik. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Thruelsen tersebut, manajemen konflik yang mencakup upaya penegakan perdamaian melalui intervensi, mediasi maupun pembentukan program-program keamanan bagi Ukraina telah diimplementasikan dengan baik mengacu pada ENP. Berbagai upaya mediasi mulai dari *Geneva Format*, *Minsk Protocol I & II* hingga *Normandy Summit* telah difasilitasi oleh UE demi mencapai

kesepakatan damai antara Ukraina dengan Rusia maupun kelompok separatis di *Donbass Region*. Tak hanya itu, tindakan-tindakan untuk meminimalisir eskalasi konflik seperti halnya pembentukan Frontex, EUBAM, EUAM beserta reformasi sektor keamanan bagi Ukraina juga telah dicoba oleh UE. Akan tetapi, walaupun implementasi dari upaya-upaya yang dicanangkan oleh UE ini telah terlaksana, namun nyatanya hasil yang didapatkan tidak sepenuhnya memuaskan. Ini dikarenakan, upaya mediasi yang telah berjalan sebelum-sebelumnya kerap kali menemui jalan buntu lantaran keputusan-keputusan dalam kesepakatannya sering menuai kontroversi lantaran tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam negeri Ukraina sendiri. Padahal, tindakan pendukung lainnya seperti halnya implementasi dari program-program dan reformasi sektor keamanan di Ukraina telah berusaha dilaksanakan oleh UE untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di wilayah Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cox, R. W., & Jacobson, H. K. (1973). *The Anatomy of Influence: Decision Making in International Organization*. Yale University Press.

Hopman, P. T. (1996). *The negotiation process and the resolution of international conflicts*. University of South Carolina Press.

Thruelsen, P. D. (2009). *International Organisations: Their Role in Conflict Management*. Royal Danish Defence College.

Jurnal Ilmiah

Bebler, A. (2015). The Russian-Ukrainian Conflict Over Crimea. *Teoriya in Praksa*, 52(1-2), 196-219.

Bojcun, M. (2016). Origins of the Ukrainian Crisis. *Critique: Journal of Socialist Theory*, 43(3-4), 395-419.

Kamov, G. (2006). *EU Role in Conflict Resolution : The Case of Eastern Enlargement and Neighbourhood Policy Area*. Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales.

Enuka, C., & Nwagbo, S. (2016). African Research Review: An International Multi-disciplinary Journal. *Regional International Organizations as Conflict Managers: The Limits and Capabilities*, 10 (2)(41), 16-30.

Mandel, D. (2016). The conflict in Ukraine. *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, 24(1), 83-88.

Mitrokhin, N. (2015). Infiltration, Instruction, Invasion: Russia's War in the Donbass. *Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society*, 1(1), 219-249.

Artikel

Council on Foreign Relations. (2021, October 01). *Conflict in Ukraine*. Retrieved October 02, 2021 from Council on Foreign Relations: Global Conflict Tracker: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>

EUAM Ukraine. (n.d.). *About Us*. Retrieved October 21, 2021 from EUAM Ukraine: <https://www.euam-ukraine.eu/our-mission/about-us/>

European Union. (n.d.). *European Border and Coast Guard Agency (Frontex)*. Retrieved October 21, 2021 from European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_en

European Union External Action. (n.d.). *Integrated Border Management*. Retrieved October 25, 2021 from European Union External Action: <https://eubam.org/what-we-do/integrated-border-managment/>

European Union External Action Service. (2021, February 08). *European Neighbourhood Policy (ENP)*. Retrieved October 02, 2021 from European Union External Action Service: https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp/330/european-neighbourhood-policy-enp_en

European Union. (n.d.). *Foreign and Security Policy*. Retrieved October 02, 2021 from European Union: https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_en

European Union. (n.d.). The EU in brief. Retrieved October 02, 2021 from European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en

Fishwick, C. (2014, March 04). 'We were so naive and optimistic': Ukraine Euromaidan protesters tell us what's changed for them. Retrieved October 02, 2021 from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/04/ukraine-crisis-protesters-kiev-euromaidan-independence-square>

Gorchinskaya, K. (2019, December 10). The Normandy Summit Ended With No Breakthroughs. What Has It Achieved? Retrieved October 25, 2021 from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/katyagorchinskaya/2019/12/10/the-normandy-summit-ended-what-has-it-achieved/?sh=142e18c33061>

Interfax-Ukraine. (2014, April 18). Full text of Geneva Agreement on Ukraine. Retrieved October 13, 2021 from Interfax-Ukraine: <https://en.interfax.com.ua/news/general/201277.html>

King, I. (2019, September 26). Not Contributing Enough? A Summary of European Military and Development Assistance to Ukraine Since 2014. Retrieved October 02, 2021 from Center for Strategic and International Studies: <https://www.csis.org/analysis/not-contributing-enough-summary-european-military-and-development-assistance-ukraine-2014>

Radio Free Europe / Radio Liberty. (2014, April 18). The Geneva Agreement -- On Paper And On The Ground. Retrieved October 13, 2021 from Radio Free Europe / Radio Liberty: <https://www.rferl.org/a/ukraine-geneva-agreement-explainer/25354335.html>

Rudin, M. (2016, April 25). Conspiracy Files: Who shot down MH17? Retrieved October 02, 2021 from BBC: <https://www.bbc.com/news/magazine-35706048>

World Bank. (2020). Statistical Capacity score (Overall average) - Ukraine. Retrieved October 02, 2021 from World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/IQ.SCI.OVRL?contextual=default&end=2019&locations=UA&start=2004&view=chart>

Laporan Resmi

European Commission. (2017, May 18). Report on the Implementation of the European

Neighbourhood Policy Review. Brussels: European Commission. Retrieved October 19, 2021 from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0018&from=EN>

European Commission. (2019, December 12).

Association Implementation Report on Ukraine. European Commission. Retrieved October 02, 2021 from https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2019_433_f1_joint_staff_working_paper_en_v4_p1_1056243.pdf

European Integration Portal. (2020). REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION 2015-2020. European Integration Portal. Retrieved October 26, 2021 from https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/a_a_implementation_report_2015-2020_eng_final.pdf

Gressel, G. (2016, October). Keeping Up Appearances: How Europe is Supporting Ukraine's Transformation. London, United Kingdom: European Council on Foreign Relations. Retrieved October 25, 2021 from https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ukraine_audit.pdf

Ivashchenko-Stadnik, K., Petrov, R., Rieker, P., &

Russo, A. (2018, January 31). Implementation of the EU's crisis response in Ukraine. EUNPACK. Retrieved October 25, 2021 from file:///C:/Users/HP/Downloads/Working-paper-2018-Ukraine.pdf

Litra, L., Medynskyi, I., & Zarembo, K. (2017, March 23). Assessing the EU's conflict prevention and peacebuilding interventions in Ukraine. Institute of World Policy. Retrieved October 21, 2021 from <http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Case-Study-Report-Ukraine.pdf>